

DAFTAR PUSTAKA

- Arsana, I. P. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Az, L. S. (2011, Mei 3). *Investor Daily Indonesia*. Dipetik Februari 25, 2019, dari id.beritasatu.com: <https://id.beritasatu.com/home/otonomi-daerah-dan-menjamurnya-korupsi-di-daerah/11061>
- Bastian, I. (2014). Akuntansi Sektor Publik. *Repository.ut.ac.id* , 1-52.
- Bauhr, M. a. (2017). Transparency to Curb Corruption? Concepts, Measures, and Empirical Merit. *Crime Law Social Change Springer* , 432.
- Belarminus, R. (2017, September 24). *Kronologi OTT Kasus Suap Dirjen Hubla Kemenhub*. Dipetik Februari 28, 2019, dari Nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/24/23220901/kronologi-ott-kasus-suap-dirjen-hubla-kemenhub>
- BPK. (2018, September). *IHPS I Tahun 2018*. Dipetik March 04, 2019, dari bpk.go.id: <http://www.bpk.go.id/ihps/2018/I>
- BPK. (2017). *IHPS II 2017*. Jakarta: BPK-RI.
- BPK-RI. (2017). *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: BPK-RI.
- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ejiogu, A. C. (2018). The Dark Side of Transparency: Does the Nigeria Extractive Industries Transparency Initiative Help or Hinder Accountability and Corruption Control? *The British Accounting Review, Elsevier* .
- Fatmawati, N. I. (2017, Juni 21). *Kronologi OTT Kasus Suap Gubernur Bengkulu*. Dipetik Februari 28, 2019, dari News.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3538058/kronologi-ott-kasus-suap-gubernur-bengkulu>
- Guangyou. (2017). Corruption Crime and Punishment: Evidence from China's State Corruption Audit. *Journal of Financial Crime, Vol. 24 No. 4, 2017, Emerald Publishing Limited* , pp. 601-619.
- Halim dan Kusufi. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

- Halle, M. a. (2010). A New Approach to Transparency and Accountability in the WTO. *entwined* , 4.
- Hantoro, J. (2018, juli 12). *Ada 15 Kasus Korupsi di Aceh Diselidiki, Polisi, Jaksa, dan KPK*. Dipetik maret 27, 2019, dari NASIONAL.TEMPO.CO: nasional.tempo.co/amp/1106325/Ada-15-Kasus-Korupsi-di-Aceh-Diselidiki-Polisi-Jaksa-dan-KPK
- Ihsanuddin. (2017, mei 27). *Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tidak Layak Dibanggakan*. Dipetik maret 27, 2019, dari Nasional.kompas.com: Nasional.kompas.com/read/2017/05/27/07111381/fitra.kpk.menunjukkan.ke.jokowi.status.wtp.tidak.layak.dibanggakan
- Indonesian Corruption Watch. (2017). *Laporan Akhir Tahun ICW* . Jakarta: antikorupsi.org.
- Ka'bah, R. (2007). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan UI* , 78.
- Kami, I. M. (2018, Februari 22). *Indeks Persepsi Korupsi 2017, Indonesia Peringkat Ke-96*. Dipetik Februari 27, 2019, dari news.detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96>
- Kemendikbud. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Dipetik Maret 04, 2019, dari kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/transparansi>
- Khairudin dan Erlanda. (2016). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN. *Akuntansi dan Keuangan* , 137- 154.
- Khairudin dan Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Se-Sumatera). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2* , hal 137-154.
- KPK. (2017). *Buku Panduan SPI 2017*. Dipetik Februari 25, 2019, dari kpk.go.id: <https://www.kpk.go.id/images/pdf/Buku-Panduan-SPI-2017.pdf>

- KPK. (2016). *Dampak Sosial Korupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
- KPK. (2017). *Laporan Ilmiah SPI*. Dipetik Februari 26, 2019, dari kpk.go.id: <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian/671-survei-penilaian-integritas>
- Kusuma, R. (2016). Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal dan Role Stress Auditor Internal terhadap Kualitas Rekomendasi Audit Internal. *Repository.unpas.ac.id*.
- Laluhu, S. (2018, November 22). *Integritas Pemprov Papua Terendah*. Dipetik march 27, 2019, dari koran-sindo.com: koran-sindo.com/page/news/2018-11-22/0/6/Integritas_Pemprov_Papua_Terendah
- Latief, F. d. (2014). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *Journal of Government UMY (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) 2 (1)*, 1-19.
- Lembaga Administrasi Negara. (2003). Akuntabilitas dan Governance. Dalam L. A. Negara, *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)* (hal. 3). Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marita, H. d. (2013). PENGARUH OPINI AUDIT DAN KINERJA KEUANGAN. *Buletin Ekonomi*, 1-86.
- Masdiantini, P. R. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1150-1182.
- Meriansa, A. I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Inspektorat dan BPKAD Kota Bandung). *Repository.unpas.ac.id*.
- Nordiawan, D. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurita, D. (2017, Desember 13). *Begini Kronologi Kasus Setya Novanto*. Dipetik Februari 27, 2019, dari nasional.tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1041781/begini-kronologi-kasus-setya-novanto/full&view=ok>

- Pemerintah Indonesia. (2006). *UU No. 15 Tahun*. Jakarta: Negara Republik Indonesia.
- (2010). Public Sector Accounting. Dalam R. J. Pendlebury, *Public Sector Accounting* (hal. 12). England: Pearson Education Limited.
- Prabowo, H. Y. (2014). To be Corrupt or Not to be Corrupt. Understanding the Behavioral Side of Corruption in Indonesia. *Journal of Money Laundering Control, Vol. 17 No. 3, 2014, Emerald Group Publishing Limited* , pp. 306-326.
- Putra, A. (2018, mei 23). *Deretan Temuan BPK dalam LHP Pemerintah Aceh 2017*. Dipetik maret 27, 2019, dari Beritakini.co: Beritakini.co/news/Deretan-Temuan-BPK-dalam-LHP-Pemerintah-Aceh-2017/index.html
- Rahayu, C. P. (2018). PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP TINGKAT KORUPSI. *e-Proceeding of Management* , 2395.
- Rahmawati, F. (2018, April 2). *Siti Masitha Dituntut 7 Tahun Penjara dan Denda Rp 200 Juta*. Dipetik Februari 2019, 2019, dari Nasional.tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1075457/siti-masitha-dituntut-7-tahun-penjara-dan-denda-rp-200-juta/full&view=ok>
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010*. Jakarta.
- Rini, R. d. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 4(1)* , 73 - 90.
- Sari, A. P. (2017). Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Jurnal Universitas Indonesia* .
- Sawyer, B. D. (2005). *Sawyer's Internal Auditing (Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2014). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis* . Jakarta: Salemba Empat.

- Setiawan, W. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Universitas Diponegoro* .
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dlengkapi dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS*. Jakarta : Kencana.
- Sitorus, C. P. (2018). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi. *e-Proceeding of Management* , 17.
- (2015). Dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (hal. 13). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, D. (2014). *Auditing Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: CAPS.
- Supriyanto, A. S. (2010). *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Malang: Erlangga.
- Tahir, D. A. (2015). Kritik Transparansi dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Repository Universitas Negeri Gorontalo* .
- Tempo.co. (2017, Maret 4). *Selama 2016, Negara Rugi Rp 3T dari Kasus Korupsi*. Dipetik Februari 27, 2019, dari Nasional.Tempo.Co: <https://nasional.tempo.co/read/852637/sepanjang-2016-negara-rugi-rp-3-triliun-dari-kasus-korupsi/full&view=ok>
- Transparency International. (2017). *Corruption Perception Index 2017*. Dipetik Maret 05, 2019, dari Transparency.org: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wasistiono, S. (2005). *Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance*. Jakarta: Fokus Media.

- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 19, No. 1, ISSN 0852-9213* , 17.
- Zulfikar, M. F. (2014). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung) .